



# PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jalan Durian No. 75 Sumbawa Besar Telp. (0371) 21798

Nomor : 800 / 64 / DPPKBPP-PA/2023  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Perihal : Mohon data dan Dokumen  
Kegiatan 2021-2022

K e p a d a  
Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN SUMBAWA  
di -  
SUMBAWA BESAR

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamualaikum.wr.wb.

Dalam rangka persiapan evaluasi mandiri Kabupaten Layak Anak, maka kami berharap dokumen kegiatan dan data indikator layak anak sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Agama (Indikator terlampir).

Dokumen tersebut agar dapat dikirimkan ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa paling lama tanggal 15 Februari 2023.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tati Haryati Nomor WA 085 237 689 971.

Demikian surat kami, atas kerjasama yang baik kami haturkan terima kasih.

Wassalamualaikum.Wr.Wb.

Sumbawa Besar, 11 Januari 2023

KEPALA DINAS PPKBPP-PA  
KABUPATEN SUMBAWA

  
JANNATULFALA, S.AP  
NIP: 19640719 198503 2 005

INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA 2022

NO	INDIKATOR
1	anggaran untuk Pencegahan Perkawinan Anak
2	Apakah dalam proses penyusunan semua peraturan di daerah terkait KLA telah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan/pendapat/usulan dari forum anak/kelompok anak? (Lampirkan dokumen usulan atau foto!)
3	Jika Ya, apakah kepentingan dan pandangan anak tersebut sudah ditindaklanjuti?
4	Apakah ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah? (Lampirkan foto pendukung)
5	Apakah ada publikasi terkait KLA yang dilakukan oleh Media satu tahun terakhir? (Lampirkan dokumen dan/atau foto pendukung)
6	Apakah ada sistem pencatatan data perkawinan anak? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)
7	Apakah ada SDM penyelenggara pencegahan perkawinan anak dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)
8	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan perkawinan anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)
9	Bagaimana keterlibatan OPD dalam penanganan Sistem pengaduan dan pendampingan pencegahan perkawinan anak
10	Bagaimana keterlibatan OPD dalam penanganan ) Bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga rentan pencegahan perkawinan anak
11	Bagaimana keterlibatan OPD dalam Pelatihan keterampilan untuk semua anak penanganan pencegahan perkawinan anak
12	Bagaimana keterlibatan OPD dalam Pencegahan Putus Sekolah/Wajib belajar 12 tahun (termasuk bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus) penanganan pencegahan perkawinan anak
13	Bagaimana keterlibatan OPD dalam Bantuan modal usaha kepada keluarga rentan penanganan pencegahan perkawinan anak
14	Bagaimana keterlibatan OPD dalam Kampanye/sosialisasi/penyuluhan penanganan pencegahan perkawinan anak
15	Bagaimana keterlibatan OPD dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi penanganan pencegahan perkawinan anak
16	Bagaimana keterlibatan OPD dalam Pengasuhan Remaja penanganan pencegahan perkawinan anak
17	Apakah ada program inovasi dalam pencegahan perkawinan anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)
18	Berapa jumlah kasus perceraian dua tahun terakhir? (Lampirkan dokumen pendukungnya!)
19	Apakah terdapat Tim PIPA (Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak)? (Lampirkan dokumen pendukung!)
20	Apakah SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)
21	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Layanan.
22	Apakah lembaga penyedia layanan PD sudah sesuai dengan standar ramah anak? (mandat Pasal 3, PP 78/2021)
23	(Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)
24	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Layanan.
25	Apakah lembaga penyedia layanan Lembaga masyarakat sudah sesuai dengan standar ramah anak? (mandat Pasal 3, PP 78/2021)
26	(Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)
27	Apakah SDM (Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiater, Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan) yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA, Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak dan pelatihan peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)